

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu Negara atau Wilayah dalam bidang pembangunan manusia (BPS,2012). Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk (Andaiyani,2012). Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk.

Ada pun tiga indikator tersebut yaitu: indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan ekonomi. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah, angka melek huruf dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil perkapital. Indonesia memiliki tiga puluh empat (34) provinsi tentunya akan memberikan gambaran mengenai pembangunan manusia yang bervariasi.

Menurut Lumbantoruan (2012) Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas on fisik melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf. Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ternyata semakin membaik selama dua dekade terakhir, meskipun laju perbaikannya relatif tertinggal dibanding dengan Negara tetangga. Ketimpangan Pembangunan Manusia di Indonesia ternyata cenderung

semakin mengecil. Pada tahun 2011 Indeks Pembangunan Manusia kawasan Sumatera, Jawa dan Bali pada umumnya berada di atas rata-rata Nasional (72,77). Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia Kawasan di luar Jawa, Sumatera dan Bali (Indonesia Tengah, Kalimantan Timur) pada umumnya di bawah rata-rata Nasional kecuali Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Sementara itu, daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua juga telah mengalami kemajuan tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang lebih pesat dibanding daerah lainnya.

Pembangunan Manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak Negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, banyak Negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti : penyalahgunaan obat, aids, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa Negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumberdaya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia. (UNDP, 1990) dikutip dari (Bhakti Nadia, 2012).

Pertumbuhan Ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia, baik semua orang, perempuan maupun laki - laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan

dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan Manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan.

Perkebangan pembangunan manusia di Indonesia, seperti disebutkan dalam "*Indonesia Human Development Report 2004*". Sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal tahun 1970-an sampai akhir 1990-an, pertumbuhan ekonomi memungkinkan penduduk untuk mengalokasikan pengeluaran untuk Pendidikan dan Kesehatan menjadi lebih banyak. Sementara itu pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Sampai dengan tahun 1996 tingkat pembangunan manusia regional cukup mengagumkan seperti tampak dari kurangnya kemiskinan dan membaiknya tingkat harapan hidup dan melek huruf (BPS-Bappenas-UNDP,2001). Namun pencapaian tersebut segera mendapatkan tantangan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Akibatnya krisis ekonomi tidak satu provinsipun tidak mengalami penurunan Indeks Pembangunan Manusia kembali mengalami perbaikan maupun menyamai tingkat Indeks Pembangunan Manusia tahun 1996.

UNDP membedakan tingkat Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan tiga klasifikasi yakni: *low* (Indeks Pembangunan Manusia kurang dari 50), *low-medium* (Indeks Pembangunan Manusia antara 50 dan 65,99), *upper-medium* (Indeks Pembangunan Manusia antara 66 dan 79,99) dan *high* (Indeks

Pembangunan Manusia 80 keatas). Indeks Pembangunan Manusia regional Indonesia termasuk kategori menengah ke bawah (*lower-medium*) sampai menengah ke atas (*upper-medium*). Tahun 2006 indeks pembangunan manusia regional tingkat menengah ke bawah masih diduduki Provinsi Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga Provinsi ini termasuk regional dengan rasio penduduk miskin tertinggi di Indonesia.

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ke-tiga peran yang ada maka tentunya diperlukan pula dana yang besar sebagai bentuk pengeluaran segala kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan ketiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah ini merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang diambil dan diterapkan melalui ketiga peran tersebut.

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa menggunakan pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor - sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengurangi ke miskinan.

Pembangunan Kesehatan dan Pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia, Kesehatan dan Pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan. Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Studi Rodric (lihat Meierdan,2000) diikuti oleh (Patta,2012) menemukan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak buruk juga pada pembangunan manusia suatu daerah.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Menurut Mankiw (2008), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia.

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada periode 2011–2015 adalah 67 keatas dalam satuan persen menempati urutan keempat diantara sebelas Negara–negara anggota ASEAN. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan posisi Indonesia dalam urutan keempat.

Namun Indeks Pembangunan Manusia di 33 Provinsi di Indonesia masih mengalami perbedaan yang signifikan (BPS,2012). Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara.

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada periode 2011–2015 adalah (67.09), (67.70), (68.31) dan (68.90) dalam satuan persen menempati urutan keempat di antara sebelas Negara–negara anggota ASEAN. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan posisi Indonesia dalam urutan keempat. Namun Indeks Pembangunan Manusia di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi di Indonesia masih mengalami perbedaan yang signifikan. (BPS,2012).

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, *United National Development Programme* (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu Negara. Konsep Indeks Pembangunan Manusia menurut UNDP dan Badan Pusat Statistik (BPS,2012) mengacu pada pengukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup:

1. Angka harapan hidup untuk mengukur pencapaian dibidang Kesehatan.
2. Angka melek huruf dan rata-rata lama Sekolah untuk mengukur pencapaian dibidang Pendidikan.

3. Standar kehidupan yang layak yang di indikasikan dengan logaritma normal dari produk domestik regional bruto perkapital penduduk dalam peoritas daya beli.

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan – permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahananpangan dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah pencapaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspik pembangunan lainnya gagal. Dari latar belakang inilah maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“FAKTOR - FAKTOR PENENTU INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2011 - 2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2011–2015?
2. Apakah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2011–2015?
3. Apakah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2011–2015?

4. Apakah Tingkat Keislaman (Ibadah Haji) yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2011–2015?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia diprovinsi – provinsi Indonesia tahun 2011–2015.
2. Untuk menganalisis pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia diprovinsi–provinsi Indonesia tahun 2011 – 2015.
3. Untuk menganalisis pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia diprovinsi–provinsi Indonesia tahun 2011– 2015.
4. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Keislaman (ibadah Haji) yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia diprovinsi–provinsi Indonesia tahun 2011 – 2015.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan menambahkan pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini merupakan syarat wajib bagi penulis dalam menyelesaikan studi, maka penulis mengadakan penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi dan penambahan wawasan bagi pihak - pihak terkait dengan permasalahan ekonomi, dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan Pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini bertisi tiga bagian: pertama, berisi pendokumentasian dan pengakjian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Kedua, mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih. Ketiga, merupakan formalisasi hipotesis. Hipotesis ini dipandang sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah, sehingga hipotesis yang disusun adalah merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Menguraikan tentang deskripsi data penelitian dan penjelasan tentang hasil dan analisis.

BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang dua hal yaitu, simpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang hasil dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini.

